

PEREMPUAN POLITISI MINANGKABAU DALAM DUNIA POLITIK : STUDI TENTANG ALASAN PEREMPUAN MEMAKNAI POLITIK

*Lidya Victorya Pandiangan**

Abstrak

Studi tentang keterwakilan politik perempuan memang sudah banyak dibahas oleh banyak akademisi atau pemerhati politik. Namun studi tentang keterwakilan perempuan dengan melihat lokasi sosial dalam kultur tertentu belum pernah diteliti. Salah satunya adalah studi pemaknaan politik perempuan di Adat Minangkabau. Studi ini mencoba untuk mengeksplorasi alasan kaum perempuan untuk terjun dan terlibat dalam dunia politik ketika mereka hidup dan berada di tengah-tengah budaya matrilineal. Penelitian ini menjelaskan data empiris yang ditemukan dilapangan sehingga mendapatkan gambaran mengenai fenomena yang diteliti dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Temuan data dianalisis menggunakan Teori Feminisme Post Strukturalis dari Sandra Harding. Hasil studi menunjukkan bahwa ada 3 alasan pemaknaan politik bagi perempuan di Minangkabau. Pertama, bahwa para politisi perempuan memaknai politik sangat identik dengan kekuasaan, dimana sebagai seorang perempuan harus berani untuk meraih sebuah kekuasaan, karena kekuasaan ditangan perempuan itu justru lebih bagus dari pada kekuasaan ditangan laki-laki. Kedua, pemaknaan dan pemahaman mereka terhadap politik lebih besar dipengaruhi oleh pengalamannya dalam organisasi sosial/politik, profesi atau pengalaman kerja. Ketiga, adanya kontribusi budaya matrilineal bagi politisi perempuan adalah bahwa pengaruh budaya matrilineal yang sangat besar bagi politisi perempuan, dimana budaya matrilineal memberikan keuntungan bagi politisi perempuan ketika mencalonkan diri sebagai legislatif dengan memanfaatkan posisi perempuan-perempuan Minang yang dekat dengan stakeholder adat. Budaya Matrilineal bukanlah budaya yang menghambat perempuan utk menjadi politisi justru lewat Budaya Matrilineal perempuan termotivasi untuk menjadi politisi.

Kata Kunci: Makna Politik, Politisi Perempuan, Budaya Matrilineal, Feminisme Post Strukturalis

Abstract

A study of the political representation of women has been much discussed by many academics or political observers. But the study of the representation of women by looking at the location of the particular culture social in haven't been researched. One of them is the study of indigenous women in political definition of the Minangkabau. This study attempts to explore the reasons for the plunge and women involved in politics when they are alive and are in the midst of matrilineal culture. This research explains the empirical data that found the situation so as to get an idea of the phenomenon was examined by using indepth interview techniques (indepth interview). Data findings are analyzed using the theory of Feminism Post Strukturalis from Sandra Harding. The results of the study show that there are three reasons for women in the political definitio of the Minangkabau. First, that women politicians interpret the politics very synonymous with power, where as a woman must dare to reach for a power, because the power in the hands of the woman was thus better than the power in the hands of men. Second, the definition and their understanding of the larger politics was influenced by his experiences in the social / political organization, profession, or work experience. Third, the existence of matrilineal cultural contribution to women politicians is that the matrilineal cultural influence is huge for women politicians, where matrilineal culture provides advantages for women politicians when running for the legislature by leveraging the position of Minang women close to the indigenous stakeholders. Matrilineal culture is not a culture that discourages women to become politicians instead of passing the culture of Matrilineal women motivated tobecome politicians.

Key Words : The Meaning Of Politics, Women Politicians, Culture Of Matrilineal

* Mahasiswa Program Sarjana Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. lidya.pandiangan@yahoo.com

Pendahuluan

Studi tentang perempuan, budaya matrilineal, dan ruang publik sudah banyak dibahas oleh para akademisi terdahulu. Namun studi kali ini memiliki kebaruan dari studi-studi sebelumnya, dimana studi ini menemukan temuan baru dimana sesuai perkembangan jaman bahwa adanya pengaruh budaya masyarakat kota yang mendukung perempuan Minangkabau dalam pemenangan kursi legislatif. Studi-studi terdahulu memaparkan dan sekaligus mengkritisi tentang sistem kekerabatan dalam etnis Minangkabau yang menekankan persoalan perempuan atau isu gender. Jika dikritisi secara seksama, maka budaya matrilineal sesungguhnya mengandung nilai kesetaraan dan keadilan gender, baik dalam tatanan filosofi, struktur, maupun implementasi yang seharusnya. Studi terdahulu menganalisis dan mengemukakan aspek dari budaya matrilineal tersebut yang memberikan kontribusi terhadap perempuan dalam komunitas masyarakat Minangkabau itu sendiri, terutama yang berkenaan dengan isu kesetaraan dan keadilan gender, sehingga bisa dilihat sebagai bagian dari *sustainable development* (Fatimah, 2012).

Studi lainnya yang berkaitan dengan perempuan, budaya matrilineal, dan ruang publik adalah studi tentang konstruksi budaya matrilineal pada suku Semende memberikan pengaruh pada sikap dan perilaku sosial perempuan Semende namun tidak memberikan pengaruh pada sikap dan perilaku politik perempuan Semende kearah budaya politik partisipan. Akan tetapi derajat kekentalan adat pada sikap dan perilaku sosial tidak terjadi pada perempuan elite karena perbedaan dukungan adat. Pada kenyataannya dukungan adat matrilineal pada masyarakat Semende tidak menciptakan perempuan menjadi poros kekuasaan pada lingkungan yang lebih luas. Hal ini membuktikan bahwa dalam masyarakat matrilineal sekalipun, kecenderungan terhadap patriarkhi masih tinggi dan menjadi hambatan kultural pada budaya politik perempuan (Alip, 2016)

Perempuan mengalami pasang surut dalam representasinya dalam dunia politik. Keterwakilan perempuan dalam dunia politik mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya

Undang-Undang Pemilu No 12 tahun 2003, yang menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai pada parlemen adalah perempuan. Di Indonesia, peningkatan calon legislatif perempuan pasca reformasi mengalami peningkatan (Faqih, 2004). Masalah keterwakilan politik perempuan adalah suatu hal yang sangat penting, khususnya dalam peristiwa penting dan besar seperti pemilu. Untuk itu, studi tentang keterwakilan perempuan ini telah banyak dibahas oleh akademisi. Perbedaan studi ini dengan studi tentang perempuan yang terdahulu bahwa penelitian ini mengkaitkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik serta alasan pemaknaan politik perempuan dalam lokasi sosial dan kultur tertentu.

Pasal 27 UUD 1945 disebutkan bahwa kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki di bidang hukum dan pemerintahan. Itu artinya, peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sudah dijamin oleh konstitusi. Keterlibatan perempuan dalam proses Pemilu menjadi hal yang menarik, mengingat Undang-Undang telah mengakomodir 30% keterwakilan perempuan dalam pengajuan calon legislatif. Keterwakilan 30% perempuan di parlemen diatur dalam UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Meskipun partai-partai politik berusaha memenuhi kuota 30% perempuan dari keseluruhan anggota calon legislatif yang mereka ajukan, namun mereka hanya menempatkan para calon legislatif perempuan tersebut di nomor-nomor urut yang besar.

Studi ini mengeksplorasi bagaimana perempuan politisi di Padang khususnya di DPRD Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Kota Padang memaknai politik ketika mereka hidup dan berada di tengah-tengah budaya matrilineal mengingat suku Minangkabau yang sangat menghormati posisi kaum perempuan. Matrilineal berarti keturunan dan pembentukan kelompok keturunan diatur menurut garis ibu (Koentjaraingrat, 2007). Hal ini sejalan dengan persepsi bahwa masyarakat dan budaya Minang mengandung nilai-nilai demokratis yang dapat dilihat dari ungkapan "*duduak samo randah tagak samo tinggi*" (duduk sama rendah, berdiri

sama tinggi) mencerminkan egalitarianisme budaya masyarakat Minang, termasuk untuk kalangan perempuan.

Dalam sistem matrilineal di Minangkabau, perempuan ditempatkan dalam posisi yang sentral, perempuan dianggap berkuasa atas harta pusaka dalam keluarga maupun kaum. Dalam literatur lama, digunakan istilah *matriachaats*, atau perempuan penyambung keturunan dan sekaligus pemilik segala kekuasaan. Di wilayah ini, perempuan ditahbiskan pertama-tama sebagai penguasa/pemilik harta pusaka keluarga (Mahmoed, 2004).

Dalam ketentuan adat, *bundo kanduang* haruslah memiliki sifat-sifat kepemimpinan, diantaranya bersifat benar, jujur, dipercaya lahir dan batin, cerdas dan punya ilmu pengetahuan, pandai berbicara dan mempunyai sifat malu. Jika dielaborasi, sifat-sifat kepemimpinan perempuan yang ditentukan dalam adat Minang tak berbeda dengan sifat-sifat kepemimpinan pada umumnya. Budayawan AA Navis mengatakan, sistem matrilineal menjadi lahan subur berkembangnya kultur demokratis justru dalam masyarakat tradisional Minang. Sebab matrilineal adalah sistem dari budaya egaliter (*egalite*) yang memungkinkan berlangsungnya kesetaraan gender. Menurutnya, matrilineal merupakan sistem untuk memantapkan kedudukan perempuan agar sederajat dengan laki-laki secara hukum, sosial, dan kebudayaan.

Meskipun menganut budaya matrilineal, namun kenyataannya perempuan-perempuan di Padang masih belum dapat mengisi kursi legislatif secara maksimal. Di Provinsi Sumatera Barat keterwakilan perempuan di parlemen atau DPRD menunjukkan penurunan. Di beberapa kabupaten/kota juga terjadi penurunan jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi DPRD. Bahkan terdapat kabupaten yang tidak memiliki wakil perempuan di DPRD, seperti Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan. Namun di beberapa kabupaten/kota juga terjadi peningkatan jumlah anggota DPRD perempuan seperti Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, dan Kota Padang. Berikut ini akan disajikan tabel perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota oleh perempuan se-Sumatera Barat pada Pileg 2014.

Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

Periode 2009-2014 dan 2014-2019

DPRD	Tahun 2009			Tahun 2014			Keterangan
	P	Kursi	%	P	Kursi	%	
Provinsi Sumbar	7	55	12.7	6	65	9.2	Turun
Kota Padang	3	45	6.7	7	45	15.5	Naik
Kab. Padang Pariaman	3	35	8.6	2	40	5	Turun
Kab. Pariaman	2	20	10	1	20	5	Turun
Kota Padang Panjang	4	20	20	4	20	20	Sama
Kab. Tanah Datar	3	35	8.6	3	35	8.6	Sama
Kab. Agam	3	40	7.5	1	45	2.2	Turun
Kota Bukittinggi	4	25	16	2	25	8	Turun
Kab. Pasaman Barat	1	35	2.8	1	40	2.5	Sama
Kab. Pasaman	1	30	3.3	2	35	5.7	Naik
Kota Payakumbuh	2	25	8	2	25	8	Sama
Kab. Lima Puluh Kota	2	35	5.7	4	35	11.4	Naik
Kab. Pesisir Selatan	0	40	0	3	45	6.7	Naik
Kab. Mentawai	0	20	0	0	20	0	Sama
Kota Solok	2	20	10	1	20	5	Turun
Kab. Solok	1	35	2.8	3	35	8.6	Naik
Kab. Solok Selatan	2	25	8	0	25	0	Turun
Kota Sawahlunto	4	20	20	4	20	20	Sama
Kab. Dharmasraya	1	25	4	1	25	4	Sama
Kab. Sijunjung	2	25	8	3	30	10	Naik
JUMLAH	47	545	8.6	49	585	8.4	Turun

Dari tabel diatas, dapat dianalisis bahwa adanya perbedaan hasil pemilu legislatif masyarakat pemilih yang ada di Kota dan di Desa. Perilaku pemilih masyarakat kota yang lebih terbuka, adanya faktor pendidikan, paparan terhadap informasi, dan paparan terhadap modernitas dibanding masyarakat desa sehingga politisi perempuan yang terpilih di tingkat kota lebih banyak daripada politisi perempuan yang terpilih di tingkat kabupaten. Persentase politisi perempuan yang terpilih di tingkat Kota lebih besar daripada persentase politisi perempuan yang terpilih di tingkat Kabupaten.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengeksplorasi alasan pemaknaan politik bagi politisi perempuan sehingga mereka masuk dalam dunia politik dan peneliti dapat mengetahui kontribusi Budaya Matrilineal bagi politisi perempuan ketika mencalonkan diri sebagai legislatif. Data diperoleh dari penelusuran dokumen, observasi, dan wawancara mendalam (*indept interview*). Wawancara mendalam dilakukan dengan informan

yang dianggap penting dalam penelitian tentang alasan pemaknaan politik bagi politisi perempuan ketika mereka hidup dan berada tengah-tengah Budaya Matrilineal. Cara menganalisa data diinterpretasi dalam bentuk deskriptif atau uraian untuk penarikan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini (Harrison, 2007).

Alasan Pemaknaan Politik dan Kotribusi Budaya Matrilineal

Perempuan sebagai kelompok minoritas, menghadapi tantangan yang cukup besar dalam melakukan bergaining dengan laki-laki didalam dunia politik, terutama dalam memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan perempuan yang seringkali dianggap tidak penting oleh kaum laki-laki. Kemampuan tawar-menawar ini tentu sangat membutuhkan ketercukupan wawasan atas persoalan-persoalan riil yang dihadapi. Oleh karena itu, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan pengalaman politik menjadi modal yang sangat penting bagi politisi perempuan. Dengan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan pengalaman politik mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan peran politiknya. Latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan pengalaman politik mereka yang masing-masing berbeda juga mempengaruhi mereka dalam memaknai politik.

Pemaknaan politik bagi politisi perempuan sangat beragam. Pertama, politisi perempuan memaknai politik yaitu sebagai kegiatan menyebarkan kebaikan atau berdakwah, menyebarkan politik dengan jujur dan benar sama dengan menyebarkan ajaran agama Islam yang pastinya juga mengajarkan kebaikan didalamnya.

Berbagai alasan yang mendasari para politisi perempuan dalam memaknai politik pada dasarnya tergantung dari latar belakang sosial mereka, seperti halnya profesi yang mereka tekuni disamping sebagai seorang politisi, selain itu keluarga juga mempengaruhi pemaknaan mereka terhadap politik. Namun secara garis besar, terdapat kesamaan dari alasan-alasan yang dikemukakan para politisi perempuan, yaitu bahwa posisi mereka sebagai seorang perempuan lah yang menjadi alasan paling utama dalam pemaknaan mereka terhadap politik, dimana perempuan wajib terlibat dan terjun dalam dunia politik, dan juga perempuan sendiri harus

berani bersaing dengan laki-laki karena kemampuan yang dimiliki perempuan tidak jauh berbeda dengan laki-laki. .

Jika dilihat dari perspektif adat dan budaya Minang sendiri, peranan perempuan Minang hingga kini terkesan paradoksial. Sekalipun Minangkabau menganut sistem matrilineal, tetapi di sisi lain perempuan pada dasarnya tetap tidak berdaya menghadapi dominasi budaya patriarki yang masih dominan dalam masyarakat lokal dan Nusantara. Berbicara tentang dominasi budaya patriarki yang masih dominan maka tidak lepas dari adanya isu kesetaraan gender dimana dalam konteks politik demokrasi menjadi sangat penting. Prinsipnya, setiap bagian dari masyarakat (tak peduli latar belakang jenis kelamin, suku, ras, agama, dan golongan) harus diutamakan dalam aksesnya terhadap jabatan publik, baik itu melalui sistem pemilihan atau bukan. Argumentasi lain yang sejalan, bahwa banyak masalah yang terkait perempuan tidak pernah serius dibicarakan para pria atau diberi prioritas memadai dalam persaingan memperebutkan jabatan dan pendanaan publik.

Di Indonesia, keterwakilan perempuan dalam politik telah menjadi isu krusial pula di era reformasi. Pelbagai Undang-Undang politik mulai mengakomodasi tuntutan keterwakilan perempuan, sebagai manifestasi gagasan kesetaraan politik. Terakhir hasilnya adalah UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik yang telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kontribusi Budaya Matrilineal bagi politisi perempuan ketika mereka mencalonkan diri sebagai legislatif. Budaya matrilineal menjadi kekuatan bagi politisi perempuan ketika mencalonkan diri sebagai legislatif. Sejatinya dengan adanya budaya matrilineal, kaum perempuan dapat memanfaatkan posisi strategis perempuan yang dekat dengan stakeholder-stakeholder adat baik itu dengan bundo kanduang, datuak, dan penghulu. Dengan posisi strategis itu, calon legislatif perempuan dapat meminta restu kepada bundo kanduang, dan juga meminta segala masukan.

Dalam Budaya Matrilineal, perempuan adalah Bundo Kanduang, dan Bundo Kanduang adalah raja, dan raja pasti berkuasa. Disini jelas kontribusi Budaya Matrilineal sangat berpengaruh bagi kaum perempuan ketika mencalonkan diri sebagai legislatif namun tetap harus melihat kemampuan juga. Jika memang perempuan mampu, kenapa tidak perempuan bisa terjun dalam dunia politik. Adanya peran Bundo Kanduang sebagai raja dalam adat, dan dukungan Bundo Kanduang untuk kaum perempuan menjadi kekuatan bagi politisi perempuan ketika mencalonkan diri sebagai legislatif. Masyarakat pada saat ini sudah cukup cerdas, mereka memilih karena melihat kepada program-program yang ditawarkan masing-masing caleg dan bagaimana sosok caleg tersebut. Karena sistemnya election, maka elektabilitas yang dilihat. Jika perempuan tidak mampu maka tidak bisa menarik masyarakat untuk memilih kita. Dalam pemaknaan politik dapat disimpulkan bahwa di jaman emansipasi perempuan sekarang banyak memberikan kesempatan untuk bekerja diberbagai bidang bahkan di bidang politik sekalipun asal peremp k-anak dan istri bagi keluarga. Dalam hal ini maka akan ada perbedaan peran perempuan yang mana perempuan terlibat aktif di wilayah publik, namun perempuan lebih banyak beraktivitas di wilayah privat. Padahal, sebagian besar aktivitas politik berada di wilayah publik. Adanya bias gender yang meligitimasi lemahnya kekuasaan politik perempuan dimana proses politik yang memisahkan ruang publik dan privat menyebabkan perempuan sulit untuk berpartisipasi dalam politik formal yang sebagian besar berada di wilayah publik. uan tidak melupakan kodrat dan tanggung jawab domestiknya sebagai seorang Ibu untuk anak

Teori Feminisme Post Strukturalis mempunyai ciri yang pertama yaitu pengalaman perempuan itu sendirilah yang akan mentransformasi perhatian dan cara ilmu sosial mendefinisikan masalah dan tugas-tugasnya. Sebagai konsekuensinya, masalah yang dianggap penting dalam ilmu sosial yang konvensional bisa jadi sekarang tidak lagi, dan demikian juga sebaliknya. Pengalaman perempuan menyediakan dasar-dasar untuk menguji hipotesis yang berbicara tentangnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa konsep tentang “perempuan” dan “pengalaman perempuan” tidak merujuk pada sebuah ide umum tentang

perempuan yang abstrak, melainkan pada konteks yang konkret, kontekstual, dan tersituasikan. Perempuan selalu bersifat konkret, terwujud, dan hadir.

Teori ini merefleksikan pandangan mengenai subjek dalam metodologi feminis yang memainkan posisi sangat menentukan. Subjek dalam metodologi feminis mengeksplisitkan dirinya dan menempatkan subjektivitas sebagai prosedur mengetahui. Hal ini berarti kelas, ras, gender, keyakinan, pengandaian-pengandaian pra-konsepsi yang dimiliki peneliti harus ditempatkan dalam kerangka deskripsi yang ia teliti. Teori Feminisme Post-Strukturalis Sandra Harding dalam penelitian ini menekankan pengalaman politisi perempuan tersebut menjadi strong objectivity bagi perempuan dimana pengalaman dan pengetahuan yang ada pada dirinya membuat politisi perempuan aktif di dunia politik untuk memajukan perempuan Minang lainnya.

Teori Sandra Harding tidak hanya melihat dari segi politisinya saja, tapi juga melihat dari segi pemilihnya (*voters*) yang berada di kota dan kabupaten. Teori ini menganalisis temuan data bahwa pemilih (*voters*) yang ada di kota lebih terbuka, dan dengan faktor pendidikan yang sudah tinggi, serta keterbukaan terhadap informasi dan modernitas membuat pemilih (*voters*) yang ada di kota lebih terbuka untuk memilih calon legislatif perempuan. Sedangkan pemilih (*voters*) yang ada di kabupaten atau daerah terpencil lebih kental akan unsur budaya dan lebih tertutup untuk memilih calon legislatif perempuan. Dalam teori Harding ini tidak hanya membuktikan bahwa budaya matrilineal tetapi juga pengaruh perilaku masyarakat kota menjadi kekuatan bagi politisi perempuan untuk terjun dan terpilih pada pemilu legislatif.

Simpulan

Makna politik bagi politisi perempuan bukan lagi dipandang sebagai arena *struggle for power* tetapi lebih pada bagaimana perempuan sebagai seorang manusia yang tidak lagi membedakan antara perempuan dan laki-laki, memaknai politik sebagai wadah aspirasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat khususnya kepentingan perempuan. Perempuan harus terlibat dalam dunia politik tanpa harus takut bersaing dengan laki-laki karena pada dasarnya

perempuan sendiri mempunyai kemampuan yang setara dengan laki-laki, karena dengan semakin berkembangnya jaman perempuan telah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dan juga telah ditunjang oleh pendidikan dan pengalaman organisasi sosial/politik. Pemaknaan dan pemahaman politisi perempuan terhadap politik justru lebih besar dipengaruhi oleh pengalamannya dalam organisasi sosial/politik, profesi atau pengalaman kerja, kesadaran terhadap kepentingan dan hak-hak perempuan dan kemauan mereka untuk terjun di dalam politik dan bukan pada tingkat pendidikan, umur, agama, maupun status perkawinannya. Pengalaman politisi perempuan tersebut menjadi strong objectivity bagi perempuan dimana adanya pengalaman kerja, pendidikan, pengalaman politik, dan pola pengasuhan politik (*political abringing*) serta pengetahuan yang ada pada dirinya membuat politisi perempuan aktif dan berkiprah di dunia politik.

Kekuatan posisi perempuan dalam budaya matrilineal dan posisi laki-laki yang juga sangat berpengaruh dalam kebudayaan Minangkabau menjadikan perempuan Minangkabau memiliki hak-hak yang proporsional berdasarkan kedudukannya sebagai bagian dari umat manusia. Posisi perempuan menjadi posisi yang kuat karena memiliki nilai tawar yang tinggi, sedangkan posisi perempuan juga bukan merupakan posisi yang mutlak yang bisa mengalahkan kedudukan laki-laki dalam lingkungan dan pergaulan sosial. Perempuan meskipun diakui berada di wilayah publik, tetap saja peran-peran domestik itu dilekatkan pada mereka. Tidak menjadi soal dalam peran domestiknya, perempuan berjuang dalam ranah tersebut. Namun ada potensi dalam diri perempuan yang sangat bisa di upgrade untuk perempuan Indonesia bisa menjadi lebih baik dalam menjawab tantangan zaman dengan isu kesetaraan. Pengaruh budaya matrilineal yang sangat besar bagi politisi perempuan memberikan keuntungan bagi politisi perempuan ketika mencalonkan diri sebagai legislatif dengan memanfaatkan posisi perempuan Minang yang dekat dengan stakeholder adat. Budaya Matrilineal bukanlah budaya yang menghambat perempuan utk menjadi politisi justru lewat Budaya Matrilineal perempuan termotivasi untuk menjadi politisi.

Dalam penelitian ini Teori Sandra Harding tidak hanya untuk melihat politisinya saja, tapi juga melihat dari segi pemilihnya (*voters*) yang berada di kota dan kabupaten. Teori ini menganalisis temuan data bahwa pemilih (*voters*) yang ada di kota lebih terbuka, dan dengan faktor pendidikan yang sudah tinggi, serta keterbukaan terhadap informasi dan modernitas membuat pemilih (*voters*) yang ada di kota lebih terbuka untuk memilih calon legislatif perempuan. Sedangkan pemilih (*voters*) yang ada di kabupaten atau daerah terpencil lebih kental akan unsur budaya dan lebih tertutup untuk memilih calon legislatif perempuan. Dalam teori Harding ini tidak hanya membuktikan bahwa budaya matrilineal tetapi juga pengaruh perilaku masyarakat kota menjadi kekuatan bagi politisi perempuan untuk terjun dan terpilih pada pemilu legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

Fakih, Mansour, 2004, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Harrison, Lisa, 2007, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta : Kencana

Koentjaraningrat, 2007, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djambatan

Mahmoed, Sutan, 2004, *Nagari Limo Kaum Pusat Bodi Caniago Minangkabau*, Padang : Yayasan Mesjid Raya Limo Kaum

Fatimah, 2012, *Gender dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori, Praktek Dan Ruang Lingkup Kajian*.

<http://www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/download/53/26>

Utama, Alip Susilowati, 2016, *Budaya Politik Perempuan Semende di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*.

<http://digilib.unila.ac.id/24586/3/3.%20TESIS%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>